Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Kepada Pelaku “Main Hakim Sendiri” (Eigenrichting) Studi Putusan Nomor Perkara 929/Pid.B/2021/PN LBP Pengadilan Negeri Lubuk Pakam

Rizki Prima Surbakti¹, Mahzaniar²

Abstract: The study is to find out the basis for judge's consideration in rendering the court of habi bottom of case number: 929/ pid. B/2021/ pn LBP. Legislation regulations - invitations especially the law - the penal code has not set out specifically regarding the ACTS of vigilantes, but it does not mean that the law cannot be applied at all if ACTS of vigilantes occur. There are chapters governing vigilantism, article 170 of violence, article 351 of abuse. As for the kind of research the author USES is a descriptive analytical type, which reveals laws relating to legal theories that become objects of study. As for a method form of research writing this isa normatizing juridical approach. Normatif juridical's juridical approach method was that the study studied only secondary library or data, which might include legal material of primier, secondary, and tertiary. Based on the results of this study, it is now known that the basis for judge's consideration in ruling the court of habi bottom of case number: 929/ pid. B/2021/ pn's about punishment against vigilantes.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Main Hakim Sendiri, Hukuman Main Hakim Sendiri

Pendahuluan

Di era globalisasi seperti saat ini, telah membawa perkembangan beberapa sektor kehidupan di masyarakat. Namun, ketika sebagian masyarakat berbahagia dapat merasakan dampak positif perkembangan yang terjadi, sebagian masyarakat yang lain harus menerima pahitnya kehidupan. Hal ini dikarenakan belum semua masyarakat mampu menikmati perkembangan yang ada. Tidak sedikit masyarakat yang berpendidikan rendah yang berdampak kepada sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Apabila masyarakat dihadapkan pada situasi seperti demikian, maka hal yang akan terlintas dalam pikiran mereka adalah bagaimana bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka dengan bagaimanapun caranya.

Hal yang menjadi sorotan kali ini adalah pola berfikir masyarakat atau cara pandang masyarakat dalam memandang atau menilai sesuatu. Sebagian masyarakat yang terjebak dalam pola berfikir yang sempit seakan terjebak, karena mereka hanya memikirkan sesuatu secara sempit tanpa mempedulikan berbagai kemungkinan lain yang dapat terjadi atau kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan suatu keadaan terjadi.

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NPM: 195114029

² Dosen Fakultas Hukum, UMN Al Washliyah NIDN : 0007035910

Terlepas daripada itu dapat kita lihat peristiwa atau kejadian yang masih sering kita dengar kabarnya dan bahkan melihat secara langsung kejadian tersebut terjadi. Dimana pada masa sekarang ini masih terjadi tindak kekerasan dalam masyarakat, tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh individu maupun secara bersama-sama atau oleh massa. Tindak kekerasan oleh massa dalam hal ini adalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan maupun pelaku pelanggaran.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Amandemen ke-IV menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila, mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara menjadi sebuah negara yang aman, tenteram, sejahtera, dan tertib. Untuk mewujudkan negara hukum maka diperlukan perangkat hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang kehidupan dalam masyarakat melalui peraturan perundang-undangan.

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan sesuatu persoalan yang tidak hanya terjadi sekali saja, namun sering, terutama di Indonesia. Saat ini tindakan individu maupun masyarakat ketika ada pelaku kejahatan di lingkungan masyarakat, reaksi yang sering terjadi, yaitu selalu mengedepankan emosi dan berbuat dengan kehendak sendiri yang termasuk tindakan menghakimi orang lain. Padahal ada asas praduga tak bersalah, yaitu asas di mana seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) memiliki arti bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan tidak ada unsur keraguan sedikitpun menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.³

Tindakan ini merupakan suatu kejahatan, dimana tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) kekerasan, khususnya kejadian atau peristiwa “penghakiman jalanan” oleh warga masyarakat yang kehidupannya terusik oleh seorang atau sekelompok orang sebagai pelaku kejahatan (*offender*).⁴ Kejahatan (*crime*) merupakan tingkah laku yang

³ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2000, hlm. 75.

⁴ Kiki Kristanto, *Perbuatan Eigen Richting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 Tahun 2015), hlm. 1.

melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.⁵

Suatu aturan hukum telah melarang adanya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) masyarakat secara bersama-sama maupun perorangan dengan sengaja melakukan penghukuman langsung berupa kekerasan terhadap pelaku kejahatan tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Hanya saja sanksi yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sulit diukur berat ringannya, karena massa terkadang dapat bertindak sesuka hati dan tidak terkendali.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya telah membawa pula dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.⁶ Dengan berkembangnya jaman pada masa sekarang ini tanpa memperhatikan adanya hukum yang mengatur, maka tindakan main hakim sendiri akan menimbulkan banyak persoalan yang terjadi didalam masyarakat. Penyebab terjadinya tindakan main hakim sendiri memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa lembaga hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakkan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁷

Peraturan perundang-undangan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mengatur secara khusus mengenai tindakan main hakim sendiri, akan tetapi bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan tindakan main hakim sendiri. Terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri yaitu, Pasal 170 tentang Kekerasan, Pasal 351 tentang Penganiayaan. Berkaitan dengan ini hukum dihadirkan di tengah masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia dalam usahanya dalam mencapai kesejahteraannya, supaya tidak terjadi benturan-benturan kepentingan satu sama lain. Untuk itu apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana yang

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru.*, (Jakarta: Rajawali Press), 1992, hlm. 134.

⁶ Soejono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1996, hlm. 1.

⁷ Chandro Panjaitan & Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, *Jurnall Hukum Adigama*, Hlm. 3-4

mengakibatkan kematian tentu akan dibahas melalui penelitian ini, dan dalam kenyataannya pada saat ini hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat tidak mampu mencegah terjadinya konflik-konflik kepentingan

tersebut, sehingga di mana-mana terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat.

Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius dan penanganan yang sungguh-sungguh, tindakan main hakim sendiri akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Kepada Pelaku “Main Hakim Sendiri” (*Eigenrichting*): (“Studi Putusan Nomor Perkara 929/Pid.B/2021/PN Lbp di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam”)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri dalam perkara Nomor berdasarkan kasus putusan nomor: 929/Pid.B/2021/PN Lbp, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara nomor: 929/Pid.B/2021/PN Lbp

Metode Penelitian

Adapun bentuk metode dari penelitian penulisan ini adalah suatu metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif ialah pada penelitian ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primier, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara ialah menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam hal ini penulis membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumentasi lainnya. Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk pengumpulan data-data.

Pembahasan dan Hasil

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor : 929/Pid.B/2021/PN Lbp

Kasus yang diambil dalam bahan penelitian ini adalah kasus perkara tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang diputuskan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Lbp, menyebutkan terdakwa 1 bernama Sopian Ginting Alias Pian, tempat dan tanggal lahir Pancur Batu 12 Desember 1982, berjenis kelamin laki-laki, beragama Krsten, bertempat tinggal Dusun II Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Dan terdakwa 2 bernama Joni Anto Sinuraya Alias Joni, tempat dan tanggal lahir Pancur Batu 21 September 1985, berjenis kelamin laki-laki, beragama Krsten, bertempat tinggal Dusun II Desa Sugau Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan putusan hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan **Terdakwa I. Sopian Ginting Alias Pian dan Terdakwa II. Joni Anto Sinuraya Alias Joni** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; dan Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. Sopian Ginting Alias Pian dan Terdakwa II. Joni Anto Sinuraya Alias Joni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam les merah motif dan bercak darah;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam les merah motif kotak kotak terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah pisau panjang 50 (lima puluh) cm bergagang kayu;
 - 1 (satu) buah pisau tumbuk lada sepanjang 25 (dua puluh lima) cm bergagang kayu;
 6. Dirampas untuk dimusnahkan;
 7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Para Terdakwa

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, ia menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup:⁸

- 1) Keadaan jiwanya:
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
 - c) Tidak terganggu karena terejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/ koorts, nyidamdan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

⁸ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafka). 2002. hlm. 249

2) Kemampuan jiwanya:

- a) Dapat menginsyaf hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: ⁹

- a. Perbuatan pidana,
- b. Mampu bertanggung jawab,
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan,
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1982, hlm.75-76

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Pelaku perbuatan main hakim sendiri dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur sebagaimana yang disebutkan pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana diatas. Sehingga pelaku yang main hakim sendiri yang mengakibatkan korban terluka hingga meninggal dunia dalam hukum pidana di Indonesia dapat dipidana apabila pelaku dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus sanksi bagi pelaku main hakim sendiri. Namun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku main hakim sendiri dapat dikenakan pasal-pasal sebagaimana yang terdapat didalam KUHP yakni Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman pidana penjara atau denda, yang berbunyi : “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-, Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun, Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun, Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja, Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum”.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Lbp

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah (*guilty*) melakukan tindak pidana “ melakukan kekerasan terhadap orang“ secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan kedua. Dan Majelis hakim setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi studi bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah

proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, yakni proses dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan sampai pelaksanaan putusan di pengadilan.¹⁰

Pada tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dilakukan oleh dua orang bahkan lebih, tidak jarang tindak pidana ini terjadi karena orang yang turut serta melakukan tindak pidana main hakim sendiri. Pada perkara di atas perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam turut serta dalam melakukan tindak pidana, dan sebagai orang yang turut melakukan disebut *mededader* yakni secara langsung ikut mengambil bagian dalam tindak pidana, dan dapat diancam dengan pidana untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya pelaku.

Peristiwa main hakim sendiri sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut seakan-akan hal yang lumrah tanpa disadari perbuatan tersebut dapat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Akibatnya sistem penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum sangatlah penting, inisiatif anggota masyarakat dapat melaporkan apabila terjadi kejahatan, sehingga dapat menggerakkan roda hukum pidana..

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri dalam Perkara Nomor Berdasarkan Kasus Putusan Nomor: 929/Pid.B/2021/PN Lbp

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tindak pidana main hakim sendiri yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang terhadap seorang wanita yang bernama Ersada Ginting. Akibat dari perbuatan tersebut Ersada Ginting menderita luka-luka di bagian tubuhnya.

Dalam kaitannya dengan jenis-jenis penganiayaan Menurut Adami Chazawi, mengemukakan “Perbuatan yang mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dimasukkan dalam kategori kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het lijf*) ini ditujukan bagi perlindungan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media), 2010, hlm. 13

yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.”¹¹

Tindak pidana terhadap tubuh/kejahatan terhadap tubuh manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut “penganiayaan” tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-sewenang. Pengertian tersebut sangat luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.

Kejahatan terhadap tubuh ada 2 (dua) macam yaitu:

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan :

1. (mishandeling), dimuat dalam Bab XX buku II Pasal 351-Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka. Selain tindak pidana terhadap tubuh/penganiayaan diatur dalam Bab XX buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka ada juga tindak pidana kekerasan terhadap seseorang atau barang di muka umum secara bersama-sama (Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Terhadap tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif untuk menjerat para terdakwa yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penyusunan dakwaan secara alternatif ini diberikan suatu alternatif yang bergantung bagaimana perkembangan di persidangan mengenai dakwaan mana yang terbukti. Umumnya dakwaan yang disusun secara alternatif ini unsur pasalnya saling menghapuskan satu sama lain dalam arti apabila unsur tertentu telah terbukti unsur yang lain pasti tidak terbukti, demikian juga sebaliknya. Dakwaan alternatif disebut juga dakwaan pilihan. Dalam menyusun surat dakwaan secara alternatif, dibuatkan beberapa dakwaan, tetapi perbuatannya hanya satu saja.

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. (Jakarta: Rajawali Pers). 2010. hlm. 7

Bila dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban. Maka sudah tepat bila Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif agar majelis Hakim juga dapat memilih yang mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Perbuatan para terdakwa dengan melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang mengakibatkan luka-luka secara bersamaan. Perbuatan tersebut juga bisa masuk dalam rumusan Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bisa juga masuk dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Praktik sebenarnya penerapan dakwaan alternatif mengandung nuansa-nuansa yuridis, baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Nuansa yuridis yang bersifat positif tampaknya terdakwa sulit untuk lolos dari jerat dakwaan, pembuktian lebih seanehaneh karena dapat langsung dibuktikan terhadap dakwaan mana yang dipandang terbukti oleh jaksa penuntut umum maupun oleh hakim. Sebaliknya nuansa yuridis negative Timbul kesan seolah-olah pada dakwaan alternatif jaksa penuntut umum ragu-ragu terhadap tindak pidana yang didakwanya.

Penutup

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara khusus sanksi bagi pelaku main hakim sendiri. Namun untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku main hakim sendiri dapat dikenakan pasal-pasal sebagaimana yang terdapat didalam KUHP yakni Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan dengan ancaman pidana penjara atau denda, yang berbunyi : “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-, Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun, Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun, Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja, Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum” Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana (Perkara Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp), dengan memerhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan berupa mendengarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa. Kemudian pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan mempertimbangkan pembelaan/pledoi terdakwa. Majelis hakim kemudian berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa dengan secara bersama-sama melakukan penganiayaan

atau main hakim sendiri berdasarkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Penerapan aturan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh para terdawa secara turut serta, dalam perkara (Nomor 929/Pid.B/2021/PN Lbp), Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bagi masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan meningkatkan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti apabila terjadi tindak pidana. Bagi Majelis Hakim dalam pemuatan pertimbangan hukum pada putusan juga memuat pertimbangan dengan memerhatikan kode etik profesi kepolisian sebagai hal-hal yang memberatkan bagi polisi yang menggunakan sarana jabatan dalam melakukan perlakuan yang sewenang-wenang terhadap warga (baca: orang) yang belum terbukti bersalah (*guilty*). Bagi Penegak Hukum perlu ada sosialisasi bersama antara kepolisian/ masyarakat mengenai hak asasi dan perlakuan yang sama antara penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang sederajat/ sama-sama memiliki kedudukan hak yang sama di depan hukum.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

- Ali, Mahrus. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Cet. II. Jakarta: Kencana
- Ali, Zainuddin. 2007. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Atsasmita, Romly. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung: Mandar Maju
- Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah. 2004. *Kriminologi Syariah: Kritik Terhadap Sistem rehabilitasi*, Jakarta: ICRI
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Farid, Zainal Abidin. 2010 *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Graefika
- Hamzah, Andi. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ismu Gunaidi dan Jonaedi Efendi, 2009. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru
- Logman, Loebby Logman. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jaarta: Datacom
- Made Widnyana, I. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Meljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. Iv, Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grapindi Persada
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui-Press
- Syahni, Abdul. 2010. *Sosiologi Kriminalitas*. Banduung: Remaja Karya
- Widiyono. 2004. *Wewenang dan Tanggung Jawab*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Zainal, Abidin Dan Andi Hamzah. 2010. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Yarsif Watampne
- Zainal, Abidin. 2005. *Penghakiman Massa Kajian Atas Kasus dan Pelaku*. Jakarta: Accompli Publishing
- Karya Ilmiah**
- Chandro Panjaitan & Firman Wijaya, *Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang)*, Jurnal Hukum Adigama
- Kiki Kristanto, *Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana*, (Morality: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 Tahun 2015)
- Serikat Putrajaya, Nyoman. 2014. Artikel “*Aspek Hukum Terhadap Tindakan Anarkhis Dan Main Hakim Sendiri Dalam Masyarakat*”, disampaikan dalam Seminar Nasional, Tema: Hukum dan Penanggulangan Tindakan Anarkis. Jakarta: Universitas Tujuh Belas Agustus
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.